

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis Kebutuhan Diklat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat.

Analisis kebutuhan diklat BPKP Pusat menggunakan tiga analisis yaitu analisis organisasi, analisis pekerjaan/ tugas dan analisis individu. Analisis organisasi dapat dilihat bahwa diklat yang dilakukan dalam instansi mengacu pada visi, misi dan tujuan dari organisasi BPKP Pusat. Analisis pekerjaan dilakukan melalui identifikasi berdasarkan permasalahan atau *gap* (kesenjangan) kinerja yang ada pada organisasi. Dan analisis individu dilakukan melalui form atau kuesioner terkait kompetensi apa yang diperlukan individu tersebut. Dalam proses analisis kebutuhan diklat pada BPKP Pusat ini mengacu pada dokumen rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM) BPKP Pusat yang disebut dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP). Metode yang digunakan dalam analisis kebutuhan diklat pada BPKP Pusat sering disebut dengan metode *Training Need Analysis*

(TNA). Dengan adanya analisis kebutuhan diklat diharapkan diklat yang dilakukan di BPKP Pusat benar – benar dapat meningkatkan kompetensi pegawai sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan diklat itu sendiri untuk peningkatan pencapaian visi dan misi dari BPKP Pusat itu sendiri.

2. Rekrutmen dan Seleksi Peserta Diklat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat.

Palaksanaan rekrutmen dilakukan dengan memberikan edaran pemberitahuan rekrutmen dan rekrutmen secara online khusus untuk diklat sertifikasi. . Proses seleksi yang digunakan pada BPKP Pusat sudah tidak dilakukan secara manual seperti pengecekan berkas atau administrasi lainnya. Melainkan seleksi peserta diklat ini dilakukan melalui metode yang digunakan berbasis IT menggunakan *database* yaitu SISPEDAP (Sistem Pengelolaan Data Pegawai). Dengan adanya *database* SISPEDAP (Sistem Pengelolaan Data Pegawai) ini, dianggap memudahkan sumber daya manusia perencana diklat dalam memilih peserta diklat.

3. Penyusunan Program Diklat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat.

Penyusunan program diklat pada BPKP Pusat dilakukan di bagian PUSDIKLATWAS (Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengawasan). Penyusunan program diklat dilakukan untuk

mempermudah saat penyelenggaraan diklat berlangsung serta untuk memastikan pelaksanaan diklat dapat efektif sesuai dengan tujuannya. Dalam pelaksanaannya, penyusunan program diklat menggambarkan secara menyeluruh mengenai hal – hal yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat yaitu diantaranya adalah menentukan tujuan dan sasaran pelatihan, menentukan metode pelatihan, membuat kurikulum atau materi pelatihan, menentukan peserta pelatihan, menyediakan widyaiswara atau pelatih yang kompeten, memastikan ketersediaan fasilitas pelatihan dan membuat evaluasi pelatihan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat berimplikasi pada beberapa hal. Pertama terkait analisis kebutuhan diklat di BPKP Pusat berimplikasi sebagai dasar penyusunan program pelatihan yaitu data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan analisis kebutuhan diklat akan digunakan untuk menyusun program diklat. Selain itu, analisis kebutuhan diklat menjadi pedoman organisasi dalam merancang bangun program diklat. Ketidaksesuaian kompetensi yang ditemukan pada saat analisis kebutuhan diklat akan diubah menjadi tujuan diklat dalam proses rancang bangun program diklat. Analisis kebutuhan diklat berimplikasi sebagai masukan bagi organisasi untuk tindak lanjut kegiatan dan menentukan prioritas program diklat serta menjaga dan meningkatkan produktivitas kinerja pegawai.

Kedua, rekrutmen dan seleksi peserta diklat pada BPKP Pusat akan berimplikasi pada ketepatan sasaran kegiatan diklat. Dengan adanya rekrutmen dan seleksi yang baik, maka akan menciptakan penetapan peserta diklat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dengan ketepatan sasaran peserta diklat, akan membuat diklat akan menselaraskan tujuan dari diklat itu sendiri yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan keterampilan pegawai untuk menunjang kinerja dan memajukan organisasi. Ketiga, penyusunan program diklat berimplikasi sebagai pedoman pelaksanaan diklat. Penyusunan program diklat menjadi acuan terlaksananya program diklat. Dengan melihat isi dalam penyusunan program diklat dapat dilihat kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan diklat tersebut. Apabila telah sesuai, maka diklat yang dijalankan dianggap telah efektif dan efisien.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, implikasi yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Kepala BPKP Pusat

Kepala BPKP Pusat perlu meningkatkan perencanaan diklat yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan analisis kebutuhan diklat sebagaimana yang telah dilakukan. Proses rekrutmen dan seleksi peserta diklat perlu diperketat agar nantinya diklat yang diikuti sesuai

dengan kompetensi yang perlu ditingkatkan oleh pegawai. Pelaksanaan penyusunan program diklat perlu dipertahankan, agar pelaksanaan diklat yang akan dilaksanakan dapat terakomodir dalam penyusunan program diklat.

2. Bagi Pegawai BPKP Pusat

Untuk pegawai BPKP Pusat terutama bidang perencanaan diklat untuk lebih memperhatikan pentingnya analisis kebutuhan diklat dan meningkatkan kemampuan untuk menganalisa kebutuhan – kebutuhan diklat apa saja yang diperlukan sesuai dengan kemajuan zaman. Lebih meningkatkan proses penyeleksian peserta diklat, bilamana terdapat calon peserta diklat yang tidak sesuai, maka tidak perlu diikutsertakan agar tujuan dari diklat tersebut dapat terpenuhi untuk peserta yang benar- benar membutuhkan. Penyusunan program diklat oleh Pusdiklatwas harus menggambarkan secara lebih terperinci konten – konten yang dipaparkan dalam katalog diklat.